



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
UNIT KERJA : PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN
SUB UNIT KERJA : PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDI ANTON
2. Jabatan : KEPALA PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN
3. NHK : 96751

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.445.801.000**

1. Tanah Seluas 17023 m2 di LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 34.046.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/160 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 137.075.000
3. Tanah Seluas 2000 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 237 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 639 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 38.400.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/120 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 169.200.000
8. Tanah Seluas 261 m2 di KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 42.080.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. ---**

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERTAHAPAN **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	1.446.801.000
III. HUTANG	Rp.	312.279.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.134.522.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **31 Desember 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.